

Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang

Irwan Kosmas^a, Wendy^a

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

*Email : b2042202015@student.untan.ac.id

*Email : wendy@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Kabupaten Bengkayang. Objek pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun terakhir (2016-2021). Dari penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sangat efektif sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021 dapat dikategorikan efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas tahun 2017 sebesar 105,07% sedangkan untuk tahun 2019 adalah diatas 80%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun 2017 sangat efisien dan untuk tahun 2021 cukup efisien. Ini dilihat dari hasil yang didapat dimana pada tahun 2016 nilai efisiennya 105,53% dan pada tahun 2019 adalah dibawah 80%.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi APBD Kabupaten Bengkayang

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 yang direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri, seperti pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kategori pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2008) pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio

yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikelola guna mendorong proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu menunjang kelancaran dan keberlangsungan proses pembangunan dalam jangka panjang serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi didaerahnya (Tjondro et al., 2022).

Menurut Fitra (2006) tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Bengkayang pada periode 2003 sampai dengan 2005 menunjukkan semakin efisien (126,36%), (106%), dan (93,32%) dan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah sudah berjalan efektif (104,77%), (273,66%), dan (275,80%). Namun, hasil penelitian tersebut dapat berbeda dikarenakan kondisi ekonomi nasional maupun daerah menurun sejak periode pandemi melanda dunia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efisiensi Belanja Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006, 2006:8). APBD merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang di dalamnya tercantum informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Yuwono, 2005: 68).

Selain itu pengertian anggaran menurut (Munandar, 2001) adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Jenis anggaran sektor publik, menurut (Bastian, 2006) adalah : a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*budget of state*) b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Kuncoro (2014), PAD adalah penghasilan daerah yang bersumber dari daerah tersebut sebagai modal dasar dalam membiayai aktifitas dan operasional serta pembangunan pada daerah tersebut, sebagai bentuk kemandirian bagi suatu daerah. Sementara sumber PAD bisa berasal dari Pajak, retribusi, dan pendapatan daerah melalui badan usaha milik daerah.

Menurut Banga (2017) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh

masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Maka kepada pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber-sumber yang ada di daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan azas desentralisasi yang kita anut. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas berikut ini:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Menurut UU no 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya Kuncoro (2014) menambahkan bahwa belana daerah merupakan satu kesatuan organisasi dari perangkat daerah baik dari sekretariat daerah, dinas-dinas yang berada di daerah dan lembaga teknis lainnya milik daerah yang membelanjakan belanja daerah untuk keaktifan fungsi organisasi daerah tersebut.

Menurut Halim (2007: 322), menyatakan belanja daerah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut menurut Yuwono, dkk (2005: 108), menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa kriteria untuk pengukuran efektif dapat diukur dari pencapaian rasio antara output dengan input, dimana semakin besar nilai output dibanding input maka semakin tinggi tingkat pencapaian efektifitasnya. Namun jika output dibanding input semakin rendah maka kinerja dan pencapaiannya terkategori tidak efektif. Pengukuran efektif harus lebih terukur, detail dan spesifik. Untuk organisasi pemerintah dan publik, efektifitas biasanya

berbanding lurus dengan indikator efisiensi sehingga dalam pengukuran penempatan dan penggunaan selalunya bisa di ukur searah dan lebih tepat pada capaian yang sangat efektif .

Menurut Mahmudi (2010) Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pendapatan daerah (PAD) adalah sebuah alur kerja yang secara spesifik mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasi segenap perangkat di daerah dalam hal mencapai target penerimaan PAD, sesuai dengan standar yang telah ditentukan di awal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam hal pemenuhan pos PAD di berbagai sektor yang terdapat di daerah. Menurut Mahmudi (2011:22), efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anghgaran PAD}} \times 100\%$$

Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007):

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anghgaran Belanja}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Ani dan Dwirandra (2013) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan sampel 8 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Bali dengan objek penelitian yaitu kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Diana (2008: 1-73) melakukan penelitian tentang analisis kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Indikator kinerja laporan keuangan yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi, aktivitas, kemandirian dan pertumbuhan APBD. Hasil yang didapat memberikan bukti empiris bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan, sedangkan Provinsi Bengkulu berada pada peringkat terendah atas evaluasi laporan keuangan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif, dimana untuk pencapaian nilai dan indikator pengukuran tingkat efektifitas. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar kontribusi PAD pada belanja daerah Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2016 s.d 2021. Perbandingan data yang di ambil adalah data sebelum covid 19, dengan alasan data tersebut tidak mengalami rasionalisasi (perubahan pengurangan anggaran). Subjek penelitian ini tentang mengukur tingkat efektifitas PAD dan Belanja Daerah dan Objek pada penelitian kali ini adalah variable realisasi Anggaran, Belanja dan PAD di tahun 2016 sd. 2021.

Tingkat efektifitas penggunaan dan serapan anggaran dilakukan dengan perbandingan antara realisasi berbanding target untuk data dari tahun 2016 s/d 2021. Baik data Belanja daerah, PAD maupun pengukuran perbandingan capaian antara PAD dan Belanja daerah. Untuk pengukuran efektifitas, tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Teknis analisis data yang digunakan untuk melihat efektifitas dan efisiensi PAD dan Belanja Daerah merujuk pada (Mahmudi, 2007). Adapun rumusnya ;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas keuangan dapat dilihat berdasarkan Permendagri No. 690.900-327 tahun 1996 pada tabel berikut :

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Keuangan

No	Efektivitas (%)	Keefektivan Keuangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Permendagri No. 690.900-327 tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah menyusun target anggaran PAD dan merealisasikannya. Semakin besar rasio perbandingan realisasi PAD dibandingkan target anggarannya maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini tabel 2 yang menggambarkan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkayang pada Periode 2016 - 2021.

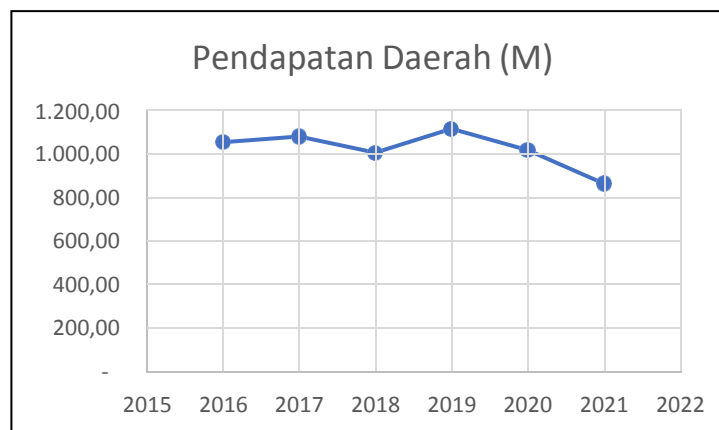
Tabel 2. Realisasi dan Efektifitas Anggaran PAD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021

Tahun	Anggaran Pendapatan (M)	Pendapatan Daerah (M)	Efektivitas (%)	Kategori
2016	1.034.29	1,051.90	101.7	Sangat Efektif
2017	1,046.95	1,078.31	102.99	Sangat Efektif
2018	999.44	1,004.43	100.5	Sangat Efektif
2019	1,148.69	1,114.02	96.98	Efektif
2020	1,101.31	1,016.59	92.31	Efektif
2021	1,031.11	863.02	83.7	Cukup Efektif

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Pada Tabel 2 di atas, data laporan realisasi PAD Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2016 hingga 2018 tingkat rasio efektivitas PAD Kabupaten Bengkayang lebih dari 100%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkayang berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong sangat efektif karena berada di dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menggambarkan pencapaian PAD tahun 2016 hingga tahun 2018 sudah mencapai target yang telah di tetapkan total anggaran PAD. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio efektifitas Kabupaten Bengkayang menurun sebesar 3,52% dari tahun 2018. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkayang tahun 2019 dan 2020 berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong efektif. Realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mencapai target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2021 rasio efektifitas Kabupaten Bengkayang menurun sebesar 8,61% dari tahun 2020 menjadi sebesar 83,7%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkayang tahun 2021 berdasarkan rasio efektifitas PAD tergolong cukup efektif. Realisasi PAD Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021 tidak mencapai target yang telah di tetapkan.

Berikut dapat dilihat melalui grafik pada Gambar 1 adanya penurunan pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas terhadap target yang dianggarkan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan pajak pada rata rata yang besar pajak dan redistribusi jadi belum optimal jadi banyak taeget yang belum bisa terpungut, selain itu dapat pula akibat dari adanya wabah covid19 yang semakin banyak sehingga mengalami penurunan dalam segi keuangan maupun perekonomian.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2021

Efektivitas Belanja Daerah

Efektivitas belanja daerah dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan target belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah menyusun target anggaran belanja daerah dan merealisasikannya. Semakin besar rasio perbandingan realisasi belanja daerah dibandingkan target anggarannya maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini tabel 3 yang menggambarkan Efektivitas Belanja Daerah di Kabupaten Bengkayang pada Periode 2016-2021.

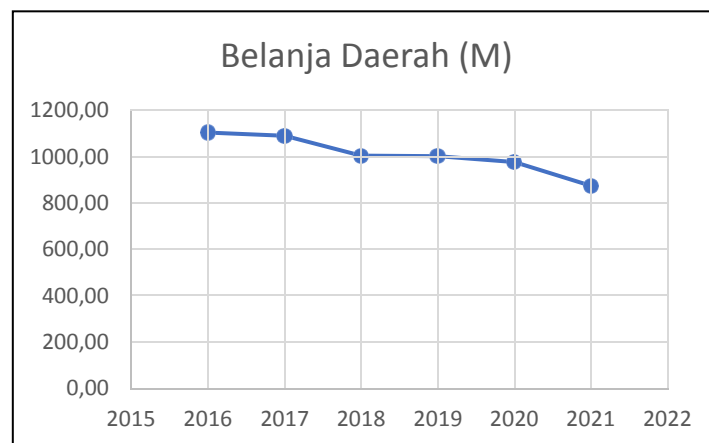
Tabel 3. Realisasi dan Efektifitas Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (M)	Belanja Daerah (M)	Efektivitas (%)	Kategori
2016	1.088,70	1103.43	101.35	Sangat Efektif
2017	1.036,31	1089.67	105.15	Sangat Efektif
2018	1.175,09	1003.65	85.41	Cukup Efektif
2019	1.142,30	1001.48	87.67	Cukup Efektif
2020	1.103,31	975.94	88.46	Cukup Efektif
2021	1.054,25	873.70	82.87	Cukup Efektif

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Pada Tabel 2 di atas, data laporan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2016 hingga 2017 tingkat rasio efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang lebih dari 100%. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkayang berdasarkan rasio efektivitas Belanja Daerah tergolong sangat efektif karena berada di dalam kisaran lebih dari 100%. Hal ini menggambarkan pencapaian Belanja Daerah tahun 2016 hingga tahun 2017 sudah mencapai target yang telah ditetapkan total anggaran Belanja Daerah. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 rasio efektivitas Kabupaten Bengkayang menurun sebesar 19,74% dari tahun 2017. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkayang tahun 2019 dan 2020 berdasarkan rasio efektivitas Belanja Daerah tergolong cukup efektif. Sehingga, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang cukup mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut dapat dilihat melalui grafik pada Gambar 2 adanya penurunan pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas terhadap target yang dianggarkan.



Gambar 2. Grafik Belanja Daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2021

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut : Anggaran pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan.

Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah maupun Belanja Daerah jika dibandingkan antara tahun 2016 hingga tahun 2019, kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016, 2017 lebih bagus dari pada tahun 2021. Ini dapat dilihat dari persentasi perbandingan antara anggaran dan realisasi pertahunnya. Dan seperti pada faktanya, untuk tahun 2020 hingga 2021 pemerintahan Kabupaten mengalami penurunan yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Sehingga perlu waktu untuk memulihkan kembali keuangan serta perekonomian di Kabupaten Bengkayang.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2016-2021 cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan yang terendah tahun 2021. Pada tahun 2016,2018,2019,2020 dikatakan efektif, hal ini karena relisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2016-2021 secara keseluruhan sudah dikelola secara baik. Dimana tahun 2016 dikategorikan sangat efisien dan tahun 2017,2018,2019,2020, dan 2021 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum.

REFERENSI

- Ani, Ni Luh Nana Putri & Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014): 481-497
(<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/8341/6218>, diakses 29 April 2022)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang (2021). APDB Pemerintah daerah. Diakses pada tanggal 29 April 2022.
- Banga, Wempy. 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bastian, I. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, Rita. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang (tidak dipublikasikan).
- Dwi Nofita Sari, et al. 2018. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, Jurnal Kinerja, Vol 15, No 1, 2018, hal. 38-43.
- Husni Mubarak, Azmir Salman.2021. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019, Oktober 2021, hal. 152 19.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Indeks, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi,Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004, otonomi dan manajemen KEUANGAN DAERAH, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munandar, A. 2001 . Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: UI.
- Pemendagri No. 690.900-327 tahun 1996, tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.
- Pemerintah RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. CV. Eko Jaya. Jakarta.
- Tjondro, H. A., Firman, F., & Riki, H. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Ekonomi Bisnis Review*. 10(1), 229–236.
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yuwono, et al. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Bayu ME. Malang.